

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis tidak terlepas dari upaya ekspansi operasional yang dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai strategi untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan nilai perusahaan (Sukmadilaga et al., 2023). Pada umumnya, tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba serta meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dianggap sangat penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kekayaan pemegang saham. Menurut (Khanifah dkk., 2020) peningkatan nilai perusahaan akan berdampak pada nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham, yang ditunjukkan melalui tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Nilai perusahaan dapat diukur melalui harga pasar saham, yang mencerminkan penilaian investor terhadap ekuitas yang dimilikinya (Khanifah dkk., 2020).

Fenomena yang berkaitan dengan nilai perusahaan dapat dilihat pada kasus PT. Freeport Indonesia yang mengalami penurunan nilai saham pada tahun 2016 yang drastis mencapai 14,51% dari US\$18,81 per unit menjadi US\$16,08 per unit. Penurunan ini terjadi setelah manajemen secara terbuka menyatakan ketidakmampuannya dalam menanggapi kebijakan lingkungan. Selain itu, operasi Freeport juga dinilai melanggar Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKLRPL) karena tidak berhasil mengendalikan pencemaran udara, sungai, hutan, dan laut yang diakibatkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (<http://www.cnbcindonesia.com>, 2018).

Dalam menanggapi fenomena tersebut, negara-negara di dunia menyelenggarakan Konvensi Rio de Janeiro yang menghasilkan forum hukum bernama *United Nations Framework Convention on Climate Change*

(UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Setelah itu, *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) dibentuk, yakni sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk menghentikan kenaikan suhu global agar tidak melebihi 2°C pada era pra-industri, serta mengupayakan pembatasan kenaikan suhu sampai 1,5°C dari tingkat suhu pada masa tersebut (Mediana, 2021).

Melalui *Paris Agreement*, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menangani perubahan iklim dengan menargetkan emisi nol atau *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang memerlukan penyesuaian regulasi secara progresif. Pelaksanaan program *net zero emission* diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dunia secara aktif mendorong program ini sebagai bagian dari kesepakatan global (Mediana, 2021).

Sebagai bentuk respons terhadap komitmen tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip keberlanjutan salah satunya melalui penerapan konsep *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) dalam aktivitas bisnisnya. Aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mencakup operasional perusahaan yang tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga pada prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Antonius & Ida, 2023). Ketiga elemen ESG ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, perusahaan dapat memberikan dampak sosial yang positif terhadap lingkungan, sehingga dapat menciptakan umpan balik yang lebih baik. Namun dari ketiga aspek tersebut, dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek *Environmental* dan *Governance*.

Aspek *Environmental* (lingkungan) dari ESG merujuk pada pengelolaan dampak perusahaan terhadap lingkungan, termasuk cara pengelolaan limbah, penggunaan energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan yang memiliki komitmen yang baik terhadap lingkungan cenderung menarik perhatian positif dari investor yang semakin

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan investasi mereka (Manulang & Soeratin, 2024).

Selain itu salah satu aspek dalam ESG yaitu aspek *governance* (tata kelola) yang berfokus pada struktur dan praktik manajerial dalam perusahaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal (Manulang & Soeratin, 2024). Pengungkapan yang baik dalam hal ini dapat mencerminkan bahwa perusahaan memiliki struktur yang kokoh. Menurut Christy & Sofie (2023), perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memperoleh kepercayaan lebih dari para investor, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Selain aspek *governance* (tata kelola), salah satu faktor yang diyakini mampu mendorong peningkatan nilai perusahaan adalah kepedulian terhadap emisi karbon. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang telah menjadi isu global, di mana perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih baik (Kurnia et al., 2021). Perkembangan isu perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca secara global mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Said et al. (2025) menunjukkan bahwa kinerja lingkungan seperti *green innovation* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan emisi gas rumah kaca berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, di negara berkembang seperti Indonesia, perhatian terhadap isu ini masih terbatas karena belum adanya regulasi yang jelas terkait pedoman atau prosedur pengungkapan. Akibatnya, pelaporan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela dan umumnya hanya merujuk pada standar ISO (International Organization for Standardization) (Sudibyo, 2018). Meski begitu, berdasarkan penelitian Kurnia et al. (2021), pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukannya memiliki keunggulan kompetitif dalam menciptakan nilai tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gabrielle & Toly (2019), Hardiansyah et al. (2021), serta Nazwa & Fitri (2022), menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh (Aeni dan Etty, 2023). Namun, Rachmawati (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengungkapan tersebut tidak berdampak pada nilai perusahaan. Hasil ini sesuai dengan temuan Afnilia & Astuti (2023) dalam studinya. Sementara itu, penelitian lain oleh Mahmudah et al. (2023) menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon secara sukarela justru berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Kondisi tersebut mendukung hasil penelitian (Pradnyawati & Werastuti, 2024).

Adapun faktor lainnya yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan ialah *green investment*. Jenis investasi ini merupakan pendekatan strategis yang dilakukan perusahaan untuk menjaga dan memperkuat validitasnya di bidang lingkungan. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas bisnisnya, namun juga berpeluang meningkatkan nilai perusahaan melalui dampak positif terhadap citra perusahaan dan keberlanjutan operasionalnya (Zhang & Berhe, 2022).

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Khalid et al. (2023), Putriani (2019), serta Tanasya & Handayani (2020) menunjukkan bahwa investasi hijau memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan studi (Lehan et al., 2025). Namun, hasil berbeda yang dilakukan oleh Rusmanto & Triyani (2022) yang menyatakan bahwa investasi hijau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aeni dan Etty, 2023).

Faktor *good corporate governance* pertama yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah komite audit. Salah satu peran utama komite audit adalah menjalin komunikasi dengan dewan komisaris terkait kondisi keuangan perusahaan (Utami dan Muslih, 2018). Komite audit juga

membantu dewan direksi dalam memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Septianto et al. (2018) serta Siti dan Ahalik (2020), komite audit terbukti memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan nilai perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Wahyuningtiasari dan Sulastiningsih, 2024).

Selain komite audit, faktor *good corporate governance* kedua yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan ialah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas kinerja manajemen. Selain itu, kepemilikan institusional juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam pengambilan keputusan oleh manajer, karena institusi cenderung tidak mudah percaya terhadap praktik manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan institusi untuk melakukan pemantauan yang ketat dan dianggap sebagai investor yang cerdas (*sophisticated investor*) yang tidak mudah tertipu oleh tindakan manajer. Umumnya, institusi memiliki kepemilikan dalam jumlah besar, sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Sugiarti dkk., 2023). Namun, berbeda dengan penelitian Dewi dan Abudanti (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Fatine dan Lailatul, 2024).

Penelitian ini berkaitan dengan teori legitimasi dan *stakeholders*, karena pada teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan perlu beroperasi dalam kerangka nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk

mendapatkan dukungan dan eksistensi jangka panjang. Sedangkan teori *stakeholders* menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, konsumen, dan pihak-pihak lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada periode 2020–2024, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan sampel perusahaan sektor energi dan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor energi dan manufaktur yang juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengungkapan emisi karbon, *green investment*, dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta meningkatnya urgensi penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan di Indonesia, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi empiris, tetapi juga memperkaya literatur akuntansi keberlanjutan dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan sektor energi dan manufaktur di negara berkembang.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon, *Green Investment*, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Energi dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pengungkapan emisi karbon berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *green investment* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan melalui penerapan prinsip keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris:

1. Pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap nilai perusahaan.
2. Pengaruh *green investment* terhadap nilai perusahaan.
3. Pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan.
4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis yang didambakan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya pada bidang akuntansi keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh pengungkapan emisi karbon, *green investment*, serta mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan sektor energi dan manufaktur di negara berkembang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan strategi keberlanjutan dan penguatan tata kelola perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata kelola perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi praktisi bisnis terkait pentingnya penerapan prinsip ESG dalam meningkatkan kepercayaan pasar.

1.4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor energi dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pengungkapan emisi karbon, *green investment*, dan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komite audit dan kepemilikan institusional. Nilai perusahaan diukur menggunakan indikator berbasis pasar yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), serta publikasi resmi Bursa Efek Indonesia dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar informasi dapat disampaikan dengan urutan logis dan berdasarkan aturan. Sistematika penulisan disajikan sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORI DAN KONSEP

Bab ini memuat uraian sistematis tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini juga menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

BAB IV : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori Legitimasi yang dipopulerkan oleh Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan untuk menyesuaikan operasinya dengan norma dan harapan masyarakat. Legitimasi organisasi merupakan proses dimana perusahaan berupaya mendapatkan pengakuan sekaligus menghindari sanksi sosial. Legitimasi ini bersifat timbal balik yang diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan sekaligus menjadi harapan perusahaan dari masyarakat.

Berbagai elemen seperti norma, nilai-nilai sosial, regulasi yang berlaku, serta batasan yang ditetapkan dalam lingkungan sosial mendorong perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan tersebut (Rusmana & Purnaman, 2020). Salah satu cara bagi perusahaan untuk memperoleh legitimasi adalah dengan menunjukkan kepada publik bahwa produk atau jasa yang mereka sediakan membawa manfaat nyata, diakui oleh kelompok tertentu dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi sosial, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, teori legitimasi dianggap relevan dalam menjelaskan nilai perusahaan. Masyarakat cenderung menerima keberadaan perusahaan tersebut mampu memberikan kontribusi positif terhadap kondisi lingkungan. Menurut Khairiyani et al. (2019) dalam F. M. Putri et al. (2024) menyatakan bahwa reputasi yang baik di mata publik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Melalui penerapan teori legitimasi, perusahaan cenderung menghindari tindakan yang dapat menimbulkan

kontroversi. Wahyuni (2023) juga menjelaskan bahwa citra positif perusahaan yang terbentuk dari legitimasi sosial dapat memengaruhi nilai perusahaan.

2.1.2 Teori Stakeholders (Stakeholders Theory)

Teori *Stakeholders* menurut Freeman (2010) menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak seperti investor, konsumen, dan masyarakat. Investor lebih tertarik pada perusahaan yang peduli terhadap keberlanjutan dan dampak sosial. Salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan adalah melalui pengungkapan emisi karbon, yang dapat membangun kepercayaan investor dan meningkatkan nilai perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial dan lingkungan.

Di era sekarang, tuntutan pemangku kepentingan semakin mengarah pada isu-isu global seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, frekuensi bencana alam yang meningkat, serta emisi karbon. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil inisiatif dalam mengelola kinerja karbon secara efektif guna mengurangi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, teori *stakeholders* memiliki hubungan erat dengan pengungkapan emisi karbon dan investasi berkelanjutan (Rachmawati, 2021).

2.1.3 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) dan banyak digunakan dalam bidang akuntansi dan keuangan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan informasi kepada pihak eksternal, khususnya investor, guna mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pasar. Dalam kondisi di mana investor tidak memiliki informasi yang sempurna mengenai kinerja dan prospek perusahaan, informasi yang

diungkapkan oleh manajemen berfungsi sebagai sinyal mengenai kualitas dan nilai perusahaan di masa depan.

Dalam konteks penelitian ini, pengungkapan emisi karbon dan *green investment* dipandang sebagai bentuk sinyal positif yang dikirimkan perusahaan kepada investor untuk menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan pengelolaan risiko lingkungan. Perusahaan yang secara sukarela dan transparan mengungkapkan informasi emisi karbon serta mengalokasikan sumber daya pada investasi hijau menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki orientasi jangka panjang, kesadaran terhadap isu lingkungan, serta strategi bisnis yang berkelanjutan. Sinyal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki persepsi pasar, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Connelly et al. (2011) menyatakan bahwa sinyal yang kredibel, konsisten, dan relevan akan lebih efektif dalam memengaruhi persepsi investor. Pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan secara berkelanjutan mencerminkan kualitas manajemen dan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko non-keuangan, termasuk risiko lingkungan dan regulasi. Oleh karena itu, semakin baik pengungkapan emisi karbon dan praktik *green investment* yang dilakukan perusahaan, semakin kuat sinyal positif yang diterima oleh pasar, sehingga berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, teori sinyal juga relevan dalam menjelaskan peran tata kelola perusahaan sebagai mekanisme yang meningkatkan kredibilitas sinyal yang disampaikan kepada investor. Keberadaan komite audit yang efektif dan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berfungsi sebagai alat pengawasan yang memperkuat keandalan informasi yang diungkapkan perusahaan. Investor cenderung menilai bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang baik memiliki transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga sinyal yang disampaikan

melalui laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan dianggap lebih dapat dipercaya.

Dengan demikian, teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada investor sebagai bentuk sinyal mengenai kinerja dan prospek perusahaan. Dalam konteks keberlanjutan, pengungkapan informasi lingkungan seperti emisi karbon dan aktivitas ramah lingkungan dapat menjadi sinyal positif bagi investor. Hal ini didukung oleh penelitian Said et al. (2025) yang menunjukkan bahwa informasi terkait kinerja lingkungan berpengaruh terhadap penilaian investor dan nilai perusahaan.

2.1.4 Environmental Management Accounting (EMA)

Environmental Management Accounting (EMA) atau Akuntansi Manajemen Lingkungan merupakan suatu sistem akuntansi yang menggabungkan informasi terkait lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Tujuan dari EMA adalah untuk mengidentifikasi, menghitung, dan mengevaluasi biaya serta manfaat lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. EMA tidak hanya berfokus pada aspek finansial seperti biaya pengolahan limbah dan penggunaan energi, tetapi juga mencakup data non-finansial, misalnya jumlah limbah bahan baku yang dihasilkan serta tingkat emisi karbon dari aktivitas produksi (Tarumingkeng, 2025).

Salah satu perusahaan minuman berskala internasional mulai menerapkan *Environmental Management Accounting* (EMA) untuk memantau penggunaan plastik dalam kemasan produknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, perusahaan tersebut merancang langkah-langkah untuk mengganti kemasan plastik dengan material yang dapat terurai secara alami atau di daur ulang. Upaya ini tidak hanya berhasil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memperoleh tanggapan positif dari konsumen serta

memperkuat citra merek perusahaan. Di sisi lain, pendekatan aktif perusahaan dalam menghadapi isu lingkungan turut menarik minat yang berorientasi pada prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Tarumingkeng, 2025).

Maka, penerapan *Environmental Management Accounting* (EMA) memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Melalui pendekatan yang menekankan pada pengurangan dampak terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi operasional, dukungan dalam pengambilan keputusan strategis, kepatuhan terhadap peraturan, serta peningkatan citra perusahaan, EMA menjadi instrumen penting bagi bisnis yang ingin berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu lingkungan, perusahaan yang mengadopsi EMA tidak hanya mendapatkan manfaat berupa efisiensi dan penghematan biaya, tetapi juga memperoleh kepercayaan publik dan keunggulan dalam persaingan pasar. Dengan demikian, EMA bukan sekedar sistem akuntansi tambahan, melainkan strategi integral untuk mendorong pertumbuhan perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan (Tarumingkeng, 2025).

2.1.5 Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah suatu konsep yang menggabungkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berfungsi sebagai indikator non-keuangan. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Yudha & Rahman, 2024).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan, semakin banyak investor yang memasukkan kriteria ESG dalam analisis mereka. Penerapan ESG menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi dan merupakan bagian dari strategi

yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Rismanto, 2024).

Sarnisa et al. (2022) menekankan bahwa pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *Environmental, Social, Governance* (ESG) dapat meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hal ini berpotensi menarik minat investor untuk berinvestasi, yang akan berdampak positif pada keberlangsungan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam strategi bisnis dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan.

2.1.6 Sustainability Report

Laporan keberlanjutan merupakan suatu praktik yang mencakup pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas terhadap kinerja perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar organisasi. (Salsabilla, 2023).

Laporan keberlanjutan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab etis terhadap lingkungan dan sosial di era operasionalnya (Syeliya et al., 2018, dalam Atahau & Kausar (2022) Selain itu, laporan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mempermudah akses bagi para investor, di mana nilai yang tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang positif. Laporan keberlanjutan dianggap mampu menyajikan informasi yang menyeluruh mengenai kinerja perusahaan, dengan keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan, dan keuntungan (*Triple Bottom-Line*) yang diperkenalkan oleh (Elkington, 1998, dalam Pratama et al, 2020). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan yang menjelaskan pencapaian perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sangatlah krusial. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai agen etis bagi perusahaan, di mana aktivitas

dan interaksinya dengan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan adanya tanggung jawab etis, perusahaan perlu memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam operasionalnya.

2.1.7 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan ukuran kemampuan suatu entitas bisnis dalam memberikan pengembalian kepada para pemangku kepentingannya atau dengan kata lain mengukur keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya (Satria & Widyawati, 2023). Konsep nilai perusahaan ini juga mencerminkan nilai jual perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah saham yang beredar, total aset, dan kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan (Yuliandhari, dkk., 2023). Secara umum, nilai perusahaan sering tercermin dalam harga saham yang diperdagangkan dipasar (Rusmana & Purnaman, 2020). Harga saham ini menjadi faktor penting dalam membuat keputusan investasi. Investor percaya bahwa jika harga saham perusahaan meningkat, nilai perusahaan pun akan semakin baik, yang menjadi indikasi bahwa perusahaan memiliki prospek yang berkelanjutan dan dapat memberikan kemakmuran serta manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan (Yulfiatmi, 2021).

Kenaikan nilai perusahaan yang signifikan dapat meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan laba, sehingga memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, peningkatan nilai perusahaan yang tinggi juga dapat memberikan keuntungan tambahan, seperti peluang bisnis yang lebih baik, citra yang lebih positif di mata para pemangku kepentingan dan akses yang lebih luas terhadap modal (Prena et al., 2019).

2.1.7.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu:

- a. Menurut Purwohandoko (2017), profitabilitas merupakan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, baik melalui investasi yang dilakukan, penjualan atas investasi, maupun dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan, maka akan semakin menarik minat calon investor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Menurut Prasetyorini (2013), *leverage* adalah kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan upaya perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Saat perusahaan mengalami kekurangan modal, salah satu solusi yang dilakukan adalah melakukan pinjaman kepada kreditur dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban serta melunasi utang tersebut. Kemampuan perusahaan dalam mengelola utang dan memenuhi tanggung jawabnya mencerminkan kinerja yang baik dan kredibilitas bagi investor. Hal ini mendorong investor untuk menanamkan modalnya, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Menurut Bhaduri dalam Ervina (2010), pertumbuhan aset merupakan perubahan total aset yang dimiliki perusahaan, baik berupa peningkatan maupun penurunan. Penambahan aset perlu disertai dengan kinerja yang optimal dalam pemanfaatannya, agar aset tersebut benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Dengan demikian, peningkatan aset yang diimbangi dengan penggunaan yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- d. Menurut Wirajaya dan Dewi (2013), ukuran perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki pangsa pasar yang luas, nilai buku yang tinggi, serta laba yang signifikan. Skala perusahaan yang besar, apabila disertai

dengan kinerja yang baik, dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya dan modal yang lebih kuat dibandingkan perusahaan kecil.

2.1.8 Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan emisi karbon merupakan aktivitas perusahaan dalam mencatat, mengakui, mengungkapkan, dan mengukur besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan (Yuliandhari et al., 2023). Salah satu cara perusahaan, khususnya yang bergerak di industri dengan emisi tinggi, untuk mendapatkan respons dan citra positif dimata publik adalah dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Melalui pengungkapan informasi lingkungan tersebut, investor akan menilai bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk berinvestasi (Yuliandhari et al., 2023).

Pengungkapan emisi karbon dianggap sebagai informasi yang menguntungkan bagi investor, karena menunjukkan bahwa risiko berinvestasi pada perusahaan tersebut relatif rendah. Risiko yang lebih kecil ini berdampak pada rendahnya beban ekuitas, sehingga menurunkan biaya modal dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan maupun harga sahamnya. Ikbal (2018) dalam Bahriansyah & Ginting (2022) menyatakan bahwa para ahli akuntansi sosial meyakini informasi perusahaan tidak hanya dibutuhkan oleh pemangku kepentingan utama, tetapi juga oleh pihak lain seperti regulator, pemerintah, kelompok lingkungan, dan masyarakat sekitar yang terdampak, guna menilai kinerja dan tanggung jawab perusahaan secara menyeluruh.

Meningkatnya perhatian terhadap isu pemanasan global menjadikan pengungkapan emisi karbon sebagai hal yang semakin tinggi bagi investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Emisi karbon umumnya dihasilkan dari aktivitas seperti pembakaran fosil, proses produksi industri,

dan transportasi. Pengungkapan emisi secara transparan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk memahami dan mengevaluasi risiko serta peluang yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim terhadap perusahaan. Selain itu, keterbukaan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dapat memperkuat citra perusahaan serta meningkatkan nilainya (Marini & Herawaty, 2024).

Karbon dioksida (CO₂) merupakan gas yang paling berkontribusi terhadap emisi, terutama sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharuskan untuk menginformasikan emisi karbon kepada pemangku kepentingan, mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan mereka. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon cenderung memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar, yang dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan (Rahmanita, 2020).

Di Indonesia, komitmen untuk mengurangi emisi karbon diatur dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011. Dalam Pasal 15 Perpres No. 71 Tahun 2011, dinyatakan bahwa semua pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan emisi atau menyerap gas rumah kaca wajib melaporkan data wajib melaporkan data inventarisasi gas rumah kaca kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan yang ada, dilakukan setahun sekali. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 untuk mendukung pembangunan keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Namun, partisipasi dalam pengurangan emisi karbon di Indonesia masih bersifat sukarela (Aeni dan Etty, 2023).

2.1.8.1 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI adalah kerangka kerja atau metode yang paling banyak digunakan di seluruh dunia untuk menyusun laporan keberlanjutan organisasi. GRI menyediakan pedoman yang lengkap dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas organisasi (Pratama, et al., 2020).

Global Reporting Initiative (GRI) didirikan di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1997. Pedoman laporan keberlanjutan pertama kali diperkenalkan oleh GRI pada tahun 2000. Sejak saat itu, GRI telah melakukan revisi terhadap panduan laporan keberlanjutan pada tahun 2002, 2006, 2018, dan 2021. Pada tahun 2015, GRI mendirikan *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB), yang berfungsi sebagai entitas operasional independen di bawah GRI dan bertanggung jawab secara eksklusif untuk menetapkan standar GRI (Ramadhani, A. K., 2020). Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk kepentingan publik. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, anggota GSSB mencakup berbagai keahlian dan perspektif dari berbagai pihak. Untuk mendukung penerapan standar akuntansi yang diwajibkan, struktur tata kelola didasarkan pada pembuatan standar akuntansi, termasuk pembentukan komite Penunjukan Independen dan Komite Pengawasan Proses Tuntas (Sejati & Prastiwi, 2015 dalam Bastiar dan Syaiful, 2024).

Emisi gas rumah kaca (GRK) ini melibatkan identifikasi dan kategorisasi sumber emisi GRK berdasarkan tiga cakupan Protokol GRK yaitu *scope* 1,2, dan 3. Emisi *Scope* 1 adalah emisi yang berasal dari sumber yang dimiliki atau dikelola secara langsung oleh suatu organisasi, seperti pembakaran atau bahan bakar pada kendaraan yang digunakan oleh organisasi tersebut. *Scope* 2 mencakup emisi yang dihasilkan dari sumber energi yang dibeli dan digunakan, seperti emisi yang dihasilkan saat memanfaatkan listrik dari penyedia eksternal (contohnya PLN).

Sementara itu, *Scope 3* mencakup emisi yang berasal dari aset yang tidak langsung berkontribusi pada rantai nilai, seperti saat perusahaan atau individu membeli, menggunakan, dan membuang produk dari pemasok (Harijadi et al., 2024).

2.1.9 Green Investment

Green investment adalah konsep luas yang mencakup penggunaan modal yang berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun sektor industri, untuk berinvestasi dalam barang dan jasa yang mendukung perlindungan keanekaragaman ekosistem serta kompensasi atas kerusakan iklim (Zhang & Berhe, 2022). Investasi hijau juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari operasional mereka, yang sering disebut sebagai investasi lingkungan (Utomo & Kaujan, 2019) dalam (Aeni dan Etty, 2023). Perusahaan mengeluarkan biaya untuk menerapkan strategi pelestarian dan pengelolaan lingkungan, serta berusaha mencapai kinerja lingkungan yang baik dengan mencegah pencemaran, yang dapat berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan.

Perusahaan didorong untuk berinvestasi hijau berdasarkan tiga tanggung jawab sosial utama: konservasi sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan keadilan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dari operasional mereka, termasuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Informasi mengenai investasi hijau yang dilakukan oleh perusahaan disampaikan melalui laporan keberlanjutan dan laporan tahunan, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan (Aeni dan Etty, 2023).

Green Investment berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam investasi hijau dianggap sebagai strategi

yang mampu meningkatkan reputasi serta nilai perusahaan. Para investor semakin memahami bahwa meskipun memerlukan biaya awal yang besar, aktivitas ini akan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan di masa mendatang (Wijayanti & Budi, 2024).

2.1.10 Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan atau mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka. Nilai perusahaan berperan dalam mendorong serta meningkatkan implementasi tata kelola yang efektif oleh manajemen agar citra dan penilaian terhadap perusahaan tetap positif (Indrawati, et al., 2023).

Secara umum, terdapat 5 prinsip utama dari tata kelola perusahaan, yaitu: 1) Transparansi (keterbukaan informasi), 2) Akuntabilitas (pertanggungjawaban terhadap kinerja), 3) Responsibilitas (tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas), 4) Kemandirian (bebas dari tekanan pihak lain), dan 5) Keadilan (perlakuan yang adil terhadap semua pihak). Esensi dari tata kelola perusahaan yang baik adalah mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan terhadap manajemen serta adanya pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Setyaningrum & Fidiana, 2022).

Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, baik dari internal seperti dewan komisaris, direksi, dan karyawan, maupun dari eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, konsumen, serta pemegang saham (Sugiarti & Widyawati, 2020). Adapun tata kelola perusahaan dalam penelitian ini yaitu komite audit dan kepemilikan institusional.

2.1.10.1 Komite Audit

Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, dibentuk oleh Dewan Komisaris guna menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan. Komite ini bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite Audit harus terdiri dari setidaknya tiga orang anggota, termasuk seorang komisaris independen serta pihak independen lainnya, guna menjamin efektivitas dan kualitas pengawasan yang dilakukan (Ayu dkk., 2025).

Dengan adanya komite audit diharapkan dapat memperkuat serta mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Bakhtiar et al., 2021).

Jika komite audit melaksanakan tugasnya secara efektif, perusahaan akan mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan (Prasetyaningsih et al., 2023). Kondisi ini memberikan sinyal positif kepada para investor, mendorong minat mereka untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan (Purwaningsih & Fadli, 2022).

2.1.10.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau pemegang saham besar (*blockholders*), (Bagiana, 2022). Lembaga keuangan atau pemegang saham besar (*blockholders*) yang dimaksud mencakup perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, perusahaan asing, serta dana

pensiun. Investor institusional dinilai memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajemen (Bagiana, 2022).

Menurut Dewi & Subardjo (2020), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh berbagai entitas seperti pemerintah, lembaga keuangan, institusi yang berbadan hukum, lembaga asing, serta institusi lainnya. Entitas-entitas tersebut memiliki otoritas untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Suwisma et al., 2023). Peningkatan kepemilikan institusional oleh lembaga keuangan akan memperkuat hak suara dan pengaruh institusi tersebut dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan yang lebih kuat ini dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Aliyah & Hermanto, 2020).

Menurut Widiastuti et al. (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga eksternal. Struktur kepemilikan ini menunjukkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Pihak institusional ini mencakup perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain (Hadiansyah et al., 2022).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki institusi, semakin intensif pula pengawasan yang dilakukan (Shalini, 2020). Kepemilikan institusional yang besar mendorong investor institusional untuk lebih aktif dalam mengawasi, sehingga mampu membatasi tindakan oportunistik manajer. Selain itu, semakin besar kepemilikan dari institusi keuangan, semakin kuat pula pengaruh dan

tekanan yang diberikan untuk mendorong peningkatan nilai perusahaan (Arbi, 2020).

2.2 Telaah Riset Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Pradnyawati & Werastuti (2024) meneliti pengaruh pengungkapan emisi karbon, biaya lingkungan, dan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dan biaya lingkungan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, *good corporate governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengungkapan lingkungan dan penerapan tata kelola perusahaan belum sepenuhnya dipersepsikan oleh pasar sebagai faktor yang mampu meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Said et al. (2025) mengkaji peran aspek keberlanjutan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green innovation* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan emisi gas rumah kaca berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun, *eco-efficiency* tidak terbukti berpengaruh signifikan. Selain itu, pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kinerja lingkungan dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan variabel terkait kinerja lingkungan dan nilai perusahaan dalam konteks yang berbeda guna memperoleh hasil empiris yang lebih komprehensif.

Afnilia & Astuti (2023) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan nilai

perusahaan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan formal belum tentu mampu meningkatkan persepsi pasar terhadap nilai perusahaan.

Selanjutnya, penelitian oleh Aeni dan Etty (2023) mengkaji pengaruh pengungkapan emisi karbon dan investasi hijau terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan investasi hijau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi lingkungan lebih diapresiasi oleh investor dibandingkan alokasi investasi hijau yang belum memberikan dampak finansial secara langsung.

Penelitian Ningsih et al. (2023) menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, pengungkapan tanggung jawab sosial, dan kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa insentif kepemilikan bagi manajer dan struktur pendanaan lebih berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan faktor tata kelola dan sosial.

Fatine dan Lailatul (2024) meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa dominasi pemegang saham tertentu justru dapat

menurunkan nilai perusahaan apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang efektif.

Penelitian oleh Sugiarti dkk. (2023) meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Variabel yang digunakan meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan dan komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Wahyuningtiasari dan Sulastiningsih (2024) mengkaji pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks IDX30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan komite audit dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan masih menjadi faktor utama dalam menentukan nilai perusahaan.

Penelitian terbaru oleh Lehan et al. (2025) mengkaji pengaruh *green banking*, *green investment*, dan *eco-efficiency* terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green banking*, *green investment*, dan *eco-efficiency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik bisnis berkelanjutan semakin mendapat perhatian investor dan mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.